

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem politik yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berakar dari bahasa Yunani, yaitu *Democratia*, yang secara harfiah berarti kekuasaan rakyat, karena berasal dari kata 'demos' yang artinya rakyat dan 'kratos' yang berarti kekuasaan.¹

Sepanjang perjalanan historisnya, Indonesia telah melewati berbagai fase demokrasi dan kini tengah menjalani era reformasi. Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik menjadi esensial dan sah karena berfungsi sebagai pilar penopang demokrasi serta sarana implementasi kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada mekanisme demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik memegang posisi krusial sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah.²

Partai politik adalah sebuah organisasi terstruktur yang di dalamnya terdapat sekelompok individu dengan hierarki kewenangan internal. Secara fundamental, partai politik berfungsi sebagai instrumen atau sarana yang sah bagi kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik dan meraih kekuasaan pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Setelah berhasil meraih kekuasaan, partai politik memegang kewajiban fundamental untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Peran kontrol ini dianggap sangat krusial karena partai politik dipandang sebagai satu-satunya entitas dengan kekuatan yang cukup untuk secara efektif mengawasi jalannya pemerintahan.³ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, partai politik adalah segolongan orang yang seases, sehaluan, dan setuju dalam bidang politik.⁴

¹ Dahan, Maria Kaka, *Demokrasi*, (2021)..

² Purnamawati, Evi, *Perjalanan Demokrasi Di Indonesia, Solusi* 18.2 (2020), hal 251-264.

³ Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Prenada Media 2020), hal 18.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Arti partai politik*", diakses pada tanggal 10 oktober 2024

Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok terorganisasi yang para anggotanya dipersatukan oleh kesamaan orientasi, nilai, serta cita-cita. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki jabatan di pemerintahan, yang lazimnya ditempuh melalui jalur-jalur konstitusional, agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah mereka susun.⁵ Partai politik merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern. Fungsi esensialnya meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen anggota dan pemimpin, pengelolaan konflik, artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, serta sebagai mekanisme kontrol politik. Keberadaan partai politik yang sehat dan berfungsi merupakan indikator penting bagi kematangan demokrasi suatu negara.

Sebagai kekuatan kelompok warga negara yang diatur secara hukum, partai politik memegang peranan krusial dalam menentukan dinamika kehidupan bernegara. Fungsi signifikan partai politik adalah memperjuangkan nilai serta kepentingan konstituen yang diwakilinya demi memengaruhi kebijakan publik. Keberadaan partai politik itu sendiri merupakan ciri esensial dalam sistem demokrasi, karena ia berfungsi sebagai wadah kelembagaan untuk mengekspresikan kebebasan ide, pemikiran, dan keyakinan. Oleh sebab itu, eksistensi partai politik sangat erat kaitannya dengan prinsip kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, yang keseluruhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3).⁶

Pada awal pembentukannya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki ikatan yang sangat erat dengan sebuah kelompok bernama Jamaah Tarbiyah. Kelompok ini mulai menampakkan kehadirannya sekitar pertengahan tahun 1980-an, dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta pesat sepanjang tahun 1990-an, khususnya di lingkungan kampus-kampus umum di seluruh Indonesia. Yon Mahmudi, salah seorang deklarator atau pendiri PKS, bahkan

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 160.

⁶ Benito Asdhie Kodiyat MS, *Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan*, Jurnal EduTech 2019, No1 Vol5.

menggambarkan Jamaah Tarbiyah sebagai "santri baru nan global" (new-cum-global santri). Julukan ini mengindikasikan bahwa anggota kelompok ini memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok-kelompok keagamaan tradisional. Mereka tidak berasal dari lingkungan atau keluarga yang secara umum dikenal sebagai abangan istilah yang merujuk pada Muslim yang kurang ketat dalam menjalankan ajaran agama dan bukan pula dari kalangan sekularis. Sebaliknya, anggota Jamaah Tarbiyah ini menunjukkan keaktifan yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Islam atau dakwah di berbagai perguruan tinggi. Gerakan dakwah di kampus ini menjadi ciri khas mereka, yang pada akhirnya turut membentuk fondasi dan arah perjuangan PKS di kemudian hari. Dengan demikian, memahami sejarah awal PKS tidak bisa dilepaskan dari peran sentral dan perkembangan pesat Jamaah Tarbiyah di dunia kampus.⁷

Sejak awal 1990-an, kelompok ini telah mendominasi organisasi intra-kampus, bahkan mendirikan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Islam Kampus (FSLDK). Setelah berhasil mengakar di dalam kampus, mereka memperluas jangkauan dengan membentuk organisasi ekstra-kampus bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Gerakan ini, yang dibangun dari sinergi organisasi intra dan ekstra-kampus, mendorong Jamaah Tarbiyah untuk bertransformasi menjadi partai politik pada tahun 1998, dengan nama Partai Keadilan (PK). Namun, karena gagal melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 1999, PK kemudian berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti yang kita kenal sekarang.

Melihat bagaimana PKS berkembang sejak awal, tidak mengherankan jika cara mereka dikenal di kalangan mereka adalah dari dakwah kampus ke dakwah negara. Strategi ini menggambarkan bagaimana pengaruh yang dibangun di lingkungan kampus melalui Jamaah Tarbiyah diharapkan dapat meluas hingga membentuk tatanan negara. Namun, strategi ini tidak berhenti di situ. PKS, melalui sayap Jamaah Tarbiyahnya, kemudian menyadari pentingnya untuk menggeser dan memperluas jangkauan dakwah mereka. Fokus tidak lagi hanya pada intelektual

⁷ Muzakki, Akh. *Islamisme dan politisasi agama model PKS dalam Pilpres 2009*, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (2010), hal 72.

kampus atau struktur negara, melainkan harus menjangkau lapisan masyarakat terbawah. Dalam upaya ini, masjid memainkan peran yang sangat krusial. Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk berinteraksi dengan masyarakat dan sekaligus menjadi pusat kegiatan dakwah serta pemberdayaan mereka. Pergeseran ini menunjukkan adaptasi PKS dalam menjangkau audiens yang lebih luas, memastikan pesan dan pengaruh mereka tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Perluasan jangkauan PKS didukung oleh konsep orbit dakwah (nihwar al da'wah), yang menjadi landasan utama pergerakan mereka. Konsep ini menjelaskan bahwa gerakan PKS meliputi tiga fase penting. Fase pertama, yang disebut orbit konsolidasi internal (nihwar tanzimi), berfokus pada pembinaan dan penguatan kader di dalam partai. Setelah itu, PKS memasuki fase kedua, yaitu orbit masyarakat (mihwar al sha'b), di mana mereka mengembangkan orientasinya untuk melayani masyarakat luas dengan semangat pelayanan. Terakhir, fase ketiga adalah orbit pelembagaan (nihwar mu'assasi), yang berpusat pada pelembagaan dakwah dengan cara masuk dan memengaruhi lembaga-lembaga publik, bertujuan untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik.⁸

Sistem kaderisasi PKS merupakan tulang punggung organisasi, dirancang untuk dua fungsi utama: Rekrutmen calon anggota baru dan pengembangan berkelanjutan bagi seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Proses ini dilakukan secara transparan melalui infrastruktur kelembagaan partai yang terstruktur. Komunikasi internal dalam PKS sangat intensif. Kader-kader PKS menjalani pembinaan yang ketat dan menjalin komunikasi yang erat dengan partai, termasuk melalui pertemuan kelompok mingguan yang berfungsi sebagai forum komunikasi internal yang vital. Kebijakan, arahan, dan informasi disebarluaskan secara sistematis melalui jaringan kelompok ini, yang bertujuan untuk menjaga dan memperkuat solidaritas di antara para anggota.⁹

⁸ Muzakki, Akh. *Islamisme dan politisasi agama model PKS dalam Pilpres 2009*, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (2010), hal 72.

⁹ Mochamad Parmudi, Tulus Warsito, Sidik Jatmika, *Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi*, Jurnal Studi Gender, Vol. 13 No. 2 (2018), hlm. 143.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah penting di Provinsi Jawa Barat, dengan struktur pemerintahan daerah yang khas. Dinamika partisipasi politik di Kabupaten Bandung menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup aktif. Sebagai contoh, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 mencapai 72.18%, menunjukkan peningkatan sebesar 9.28% dibandingkan Pilkada sebelumnya, meskipun angka ini masih sedikit di bawah target pemerintah sebesar 77.5%.¹ Sebuah fenomena menarik yang teramati adalah kecenderungan kesadaran politik masyarakat di daerah perkotaan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Struktur elektoral Kabupaten Bandung yang khas (55 kursi DPRD, 7 dapil) dan pola partisipasi pemilih yang unik, seperti partisipasi yang lebih tinggi di daerah pedesaan, menunjukkan bahwa strategi nasional PKS dan evolusi ideologisnya harus dipahami melalui lensa konteks lokal yang spesifik. Keberhasilan atau tantangan PKS di Kabupaten Bandung tidak semata-mata cerminan dari kedudukan nasionalnya, melainkan sangat dipengaruhi oleh demografi lokal, geografi elektoral, kekuatan mesin partai di tingkat lokal, dan relevansi isu-isu lokal tertentu. Oleh karena itu, setiap analisis PKS di Kabupaten Bandung harus mempertimbangkan interaksi kompleks ini, mengakui bahwa dinamika politik lokal dapat secara signifikan memodulasi dampak dari strategi partai yang lebih luas.¹⁰

PKS telah mengubah strateginya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mereka tidak lagi hanya mengandalkan perolehan suara dari pemilu legislatif. Sekarang, PKS lebih fokus membentuk koalisi dengan partai lain. Tujuannya jelas: mendapatkan pengaruh dan ikut memegang kekuasaan eksekutif di pemerintahan daerah. Ini mereka lakukan bahkan ketika PKS tidak cukup kuat untuk mencalonkan pemimpinnya sendiri. Contohnya terlihat di Pilkada 2010. Saat itu, pemilih partai Islam memilih mendukung gabungan partai Islam lainnya. Ini menunjukkan bahwa PKS sadar betul: menang banyak kursi di parlemen belum tentu membuat mereka bisa memimpin daerah. PKS kini bersikap fleksibel dan realistis dalam berbagi kekuasaan. Mereka rela berkoalisi, bahkan jika harus

¹⁰ Khoirudin Muchtar dkk, *Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat*, Jurnal: Ilmu Komunikasi (2019), hal 40.

mendukung calon dari partai lain untuk posisi kepala daerah tertinggi. Ini menandakan bahwa bagi PKS, yang terpenting adalah bisa ikut dalam pemerintahan yang berkuasa. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan program dan kebijakan PKS secara efektif, meskipun harus menyerahkan jabatan kepala daerah kepada partai koalisi.

Terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih tema dan judul perkembangan partai ini, yaitu karena ketertarikannya penulis terhadap fakta-fakta sejarah partai ini yang menunjukkan bahwa partai politik memiliki beberapa peran di lingkungan masyarakat dan pemerintah, alasan selanjutnya sumber-sumber pembahasan mengenai perkembangan partai ini dekat dengan lingkungan penulis, sehingga penulis memutuskan mengangkat permasalahan ini, dan alasan pengambilan tahun 1999 yaitu menandakan awalnya mengikuti kontestasi pemilu, tahun 2020 menandakan akhirnya periode kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020, sebagai judul Skripsi yang diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang, agar penelitian ini lebih teruraikan, maka dirumuskan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi serta fakta tentang Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020. Namun, secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang

disebutkan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung.
- 2) Untuk Mengetahui Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020.

D. KAJIAN PUSTAKA

Sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian ini dikumpulkan, termasuk sumber-sumber yang berkaitan dengan judul yang penulis tulis, adapun sumber-sumber yang dirasa jelas untuk dijadikan sebagai rujukan penelitian, diantaranya:

- 1) Skripsi Penelitian Farihat Hoiriyah (2017) berjudul "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung Tahun 1999-2014" menggunakan metode sejarah untuk mengkaji pendirian dan perkembangan PKS di Kota Bandung. Namun, penelitian ini berbeda karena memfokuskan pada aspek geografis Kabupaten Bandung dan rentang waktu penelitian hingga tahun 2020.
- 2) Skripsi Penelitian Siti Ulfah Nurhasanah (2021) berjudul "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Cianjur Tahun 1999-2014" dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan metode sejarah untuk mengkaji perkembangan PKS. Sementara itu, penelitian yang sedang saya lakukan berbeda dalam hal lokasi geografis, yaitu di Kabupaten Bandung, dan cakupan tahunnya sampai 2020.
- 3) Skripsi Amelia Puspita (2019) dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul "Perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandung Tahun 1998-2004." Penelitian tersebut menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan pendirian dan perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Bandung selama periode tersebut. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada Partai Keadilan Sejahtera, menyoroti Kabupaten Bandung, dan cakupannya hingga tahun 2020.
- 4) Skripsi Maulana Fuji (2017) dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, meneliti proses pendirian dan perkembangan Partai

Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bekasi dari tahun 1998 hingga 2014, menggunakan metode sejarah. Berbeda dengan penelitian Fuji, fokus saya adalah perkembangan PKS di Kabupaten Bandung dan mencakup periode hingga tahun 2020.

- 5) Burhanudin Muhtadi dalam bukunya *Dilema PKS: Suara dan Syariah* (KPG, 2012) membahas sistem kaderisasi dan struktur kepengurusan PKS, Meskipun buku *Dilema PKS: Suara dan Syariah* oleh Burhanudin Muhtadi (2012) membahas sistem kaderisasi dan kepengurusan PKS, penelitian ini mengalihfokuskan perhatian pada perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung dari tahun 1999 hingga 2020.

E. METODE PENELITIAN

Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, "metodos," yang bermakna jalan atau cara. Dalam konteks ini, metode penelitian adalah ilmu yang membahas tata cara atau prosedur untuk memandu dalam mengkaji atau menemukan sumber-sumber sejarah, yang kemudian akan diolah menjadi sebuah kisah sejarah. Ringkasnya, metode penelitian adalah ilmu tentang bagaimana melakukan sesuatu.¹¹

Penelitian ini mengkaji "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020" melalui metode sejarah. Tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dijalankan untuk menjamin keaslian dan kredibilitas sumber. Metode ini dipilih karena sangat vital dalam menemukan bukti-bukti relevan yang mendukung penulisan sejarah yang ilmiah dan tidak memihak.

1) Heuristik

Heuristik adalah fondasi awal dalam penelitian sejarah. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *heuriskein*, yang secara harfiah berarti menemukan atau mencari. Ini menekankan bahwa prosesnya bukan hanya menemukan sumber yang tersedia, tetapi juga upaya aktif untuk menemukannya. Heuristik sendiri merupakan tahap eksplorasi, pencarian, dan pengumpulan beragam sumber sejarah, baik yang

¹¹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 73.

ditemukan di lapangan, berupa benda, maupun melalui wawancara. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan tahap heuristik ini dengan mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan topik yang diteliti.¹²

Menurut Sulasman, sumber sejarah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, sumber tertulis, yang mencakup segala bentuk keterangan sejarah dalam format tulisan, seperti yang ditemukan pada media kertas, batu, atau dinding. Kedua, sumber lisan, yang berasal dari kesaksian langsung pelaku sejarah, namun memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada ingatan, kesan, dan interpretasi subjektif individu tersebut. Ketiga, sumber benda, yaitu artefak atau benda-benda kuno peninggalan kebudayaan dari masa lampau.¹³

Hasil penelitian saya tentang Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung dari tahun 1999 hingga 2020 didasari oleh upaya ekstensif dalam mencari dan mengumpulkan beragam sumber kredibel yang menjadi rujukan utama. Untuk tahap heuristik ini, penulis mengunjungi beberapa lokasi guna menghimpun data sejarah yang diperlukan. Tempat-tempat yang dikunjungi meliputi:

- A. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung
- B. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora
- C. Perpustakaan Dispusipda Jawa Barat
- D. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati
- E. Perpustakaan Batu Api
- F. KPU Kab Bandung

1) Sumber Primer

Penulis telah mencari dan menemukan sumber primer yang relevan untuk penelitian tentang "Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020". Sumber-sumber utama ini meliputi:

¹² Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 93.

¹³ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 95.

A. Sumber Arsip

1. Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera
3. Struktur Kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung
4. Arsip pemilu 1999-2019

B. Sumber Lisan

1. H. Jajang Rohana, S. Pd.I (56 tahun), sebagai Ketua Umum periode 2010-2020 (2 periode)
2. Abdul Chalim (50 tahun), sebagai Wakil Sekretaris 1 periode 2020-2025
3. Luthfi (48 tahun), sebagai Sekretaris Umum PKS Kabupaten Bandung 2010-2020

C. Sumber Audio Visual

1. PKS Peduli Guru Ngaji dalam channel youtube PKS TV Kab Bandung tahun 2020
<https://youtu.be/C3EIEInkOus?si=uj5XvZaM0WIsOU-C>
2. Kajian Ketahanan Keluarga dalam channel youtube PKSTV Kab Bandung tahun 2017
<https://youtu.be/AfnyTROCIDg?si=upwtExpARaZi3JQL>
3. Wabup Bandung Tinjau lokasi bencana dalam channel youtube PKS TV Kab Bandung tahun 2017
<https://youtu.be/wlQdabKIVOc?si=LtjjBoeCpRsm6BhK>
4. Launching PKS Muda Kab Bandung tahun 2017
<https://youtu.be/yrZcu66oOBA?feature=shared>
5. PKS memenuhi syarat dalam masa penelitian administrasi anggota partai oleh KPUD Kab Bandung tahun 2017
<https://youtu.be/TqH4HjfEWTY?feature=shared>
6. Mengikuti acara Opening Ceremony PORPEMDA XIII Jawa Barat tahun 2017

https://youtu.be/Qoe_2eJrGPU?feature=shared

7. PKS melakukan kegiatan takjil on the road pada tahun 2017

<https://youtu.be/Y1MXdW52Ubg?si=HMtMN5vwgxTdUwT>

2) Kritik

Setelah tahap heuristik (pengumpulan sumber) penulis kemudian masuk ketahap kritik. Pada tahapan ini penulis mengkritisi memilih dan menguji keabsahan dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Ada dua kritik dalam tahapan ini, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Dalam kritik intern, penulis akan melakukan autentitas sumber berupa sumber dokuken, lisan dan sumber audio visual. Sedangkan dalam kritik ekstern, penulis akan mengkritisi objek dari sumber lisan yang diperoleh. Wawancara yang didapat perlu dikritisi oleh narasumber dari segi fisik, ingatan, dan dilihat dari cara penyampaian. Kredibilitas sumber baik tertulis maupun lisan pada prinsipnya dapat diakui apabila semua positif.¹⁴

A. Kritik Ekstern

Kritik eksternal adalah langkah pertama dalam tahap verifikasi sumber, yang berfokus pada pengujian aspek-aspek luar atau fisik dari sebuah sumber sejarah. Ini berarti peneliti menguji keaslian sumber secara fisik dan materialnya. Kritik eksternal juga dikenal sebagai kritik luar. Tujuan utamanya adalah untuk memverifikasi "keaslian atau otentisitas bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber-sumber sejarah". Kritik eksternal memastikan bahwa sumber tersebut "benar-benar asli (bukan palsu) dan memang berasal dari periode waktu yang sesuai dengan kejadian yang sedang dipelajari". Ini juga mencakup upaya untuk mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadapnya. Secara praktis, kritik eksternal berupaya menjawab pertanyaan fundamental seperti: Siapa yang membuat sumber itu? Kapan dibuat? Di mana ditemukan? Apakah dengan satu atau cara

¹⁴ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, 2011, hal 105.

lain kesaksian itu telah diubah atau dimanipulasi?. Pada dasarnya, kritik eksternal merupakan upaya untuk menguji otentisitas dan integritas sumber sejarah.

Dalam melakukan kritik eksternal, beberapa aspek kunci menjadi fokus penilaian untuk memastikan otentisitas sumber. Otentisitas dan integritas sumber sejarah adalah dua aspek yang sangat penting dalam kritik eksternal. Otentisitas mengacu pada apakah sumber itu asli, bukan dipalsukan, dan dilaporkan dengan benar sesuai keadaan senyatanya. Integritas berkaitan dengan keutuhan sumber, memastikan tidak ada bagian yang hilang atau rusak yang dapat mengubah maknanya. Sumber yang otentik adalah yang benar-benar produk dari orang yang dianggap pemiliknya.¹⁵

Kemudian, aspek fisik sumber ini adalah inti dari kritik eksternal. Meliputi pemeriksaan detail material sumber seperti jenis kertas, ukuran, bahan, kualitas, serta karakteristik tulisan seperti tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, kata-kata, dan huruf. Contoh konkret termasuk memeriksa struktur seperti warna kertas. Bahkan kualitas kertas dapat mengindikasikan periode waktu, seperti kualitas kertas Jepang yang berbeda pada masa perang. Penilaian kondisi luar dari sumber dokumen sejarah, seperti bahan pembuatan arsip, dan proses mengidentifikasi tulisan tangan, merupakan bagian dari kritik eksternal. Autentikasi Materi Visual dan Audio Keaslian dan integritas media visual/audio. Untuk foto-foto kegiatan partai atau rekaman pidato kampanye, peneliti perlu memeriksa ataupun memverifikasi tanggal dan lokasi pengambilan. Kualitas rekaman audio/visual harus dinilai apakah sesuai dengan teknologi perekaman yang tersedia dan umum pada periode atau tahun tersebut.

¹⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian...*, hal 105-107.

1. Sumber Arsip

- a) SK dan Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung tahun 2015-2020. Sumber ini merupakan primer dan otentik karena berupa salinan cetak (print out) yang didapatkan langsung dari bapak Abdul Chalim yang merupakan Wakil Sekretaris 1 DPD PKS Kabupaten Bandung.
- b) Program kerja Partai Keadilan Sejahtera tahun 2015. Sumber ini dianggap primer dan otentik karena berupa salinan cetak (print out) yang didapatkan langsung dari bapak Abdul Chalim yang merupakan Wakil Sekretaris 1 DPD PKS Kabupaten Bandung.

2. Sumber Lisan

- a) H. Jajang Rohana, S.Pd.I (56 tahun)
Beliau merupakan mantan Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Bandung, dan beliau juga mengalami, mengetahui kejadian sejarah. Selain itu, narasumber ini sangat berharga karena daya ingatnya masih sangat baik dan tetap produktif di usianya, sehingga mampu menjelaskan secara detail perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung dan peristiwa-peristiwa terkait.
- b) Abdul Chalim (50 tahun)
Beliau merupakan Wakil Sekretaris 1 DPD PKS Kabupaten Bandung, dan beliau juga mengalami, dan mengetahui. Narasumber ini juga dapat memberikan wawasan tentang peristiwa terkait objek penelitian, sebab di usianya yang sekarang ia masih produktif dengan daya ingat yang kuat untuk memaparkan perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung.

3. Sumber Audio Visual

- a) PKS Peduli Guru Ngaji dalam channel youtube PKS TV Kab Bandung tahun 2020, merupakan sumber primer karena salah satu program kerja dan didapatkan dari channel youtube PKS Kab Bandung

B. Kritik Intern

Kritik internal adalah tahapan verifikasi yang dilakukan setelah kritik eksternal selesai, dengan fokus pada pengujian aspek-aspek dalam, yaitu isi atau konten dari setiap sumber sejarah. Pentingnya urutan ini ditekankan karena sumber harus terlebih dahulu terbukti otentik sebelum isinya dapat dipercaya. Kritik internal menekankan kegiatannya dengan melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek dalam dari setiap sumber. Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah informasi yang disajikan dalam sumber itu benar dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan konteks sejarah. Kritik ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber dapat dipercaya dan mencari tahu serta membuktikan keabsahan atau kredibilitas sumbernya. Dalam praktiknya, kritik internal menekankan pada pertanyaan-pertanyaan krusial seperti: Apa sebenarnya maksud di balik pernyataan orang tersebut? Apakah individu yang memberikan kesaksian adalah saksi mata yang kompeten dan mengetahui fakta sebenarnya? Terakhir, apakah informasi yang diberikan disampaikan dengan jujur dan apa adanya?. Kritik internal merupakan tahap penting dalam penelitian sejarah, di mana kredibilitas sumber diuji secara cermat. Proses ini mencakup penilaian terhadap keakuratan informasi yang terkandung dalam sumber, tujuannya untuk memastikan validitasnya.

1. Sumber Arsip

- a) SK dan Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung. Sumber ini merupakan sumber

primer yang memberikan informasi pada peneliti mengenai susunan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung

- b) Program kerja Partai Keadilan Sejahtera. Sumber ini merupakan sumber primer yang memberikan informasi pada peneliti mengenai program kerja Partai Keadilan sejahtera Kabupaten Bandung.

2. Sumber Lisan

- a) H Jajang Rohana, S.Pd.I (56 tahun)

Beliau mampu memberikan penjelasan yang benar dan beliau juga merupakan anggota dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung.

- b) Abdul Chalim (50 tahun)

Beliau mampu memberikan penjelasan yang benar dan beliau juga merupakan anggota dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung.

3. Sumber Audio Visual

- a) PKS Peduli Guru Ngaji dalam channel youtube video beserta audio terdngar dengan jelas dan nyaring sehingga bisa mendapatkan informasi yang detail

3) Interpretasi

Tahap ketiga dalam metodologi penelitian sejarah adalah interpretasi, yaitu proses di mana peneliti menganalisis dan menafsirkan sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkannya. Pada fase ini, peneliti dituntut untuk menjaga objektivitas dan menghindari penafsiran yang bersifat subjektif. Dalam konteks penelitian ilmiah, seluruh analisis dan kesimpulan harus didasarkan secara kokoh pada fakta atau bukti-bukti sejarah yang ada.¹⁶

Dalam penelitian ini, saya memilih untuk menggunakan teori fungsionalisme struktural sebagai kerangka analisis. Berdasarkan

¹⁶ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 81.

penjelasan Soekarjo Soekanto, fungsionalisme mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem yang kompleks, di mana setiap bagian atau elemen di dalamnya saling terkait dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Teori ini secara spesifik menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan. Pemilihan istilah ini bukan tanpa alasan lembaga tidak hanya menggambarkan suatu bentuk atau pola organisasi yang terlihat, tetapi juga secara abstrak merujuk pada seperangkat norma-norma, aturan, dan nilai-nilai tertentu yang menjadi identitas khas dari lembaga tersebut. Dengan demikian, fokusnya adalah pada bagaimana struktur-struktur ini beroperasi dan berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem sosial. Secara fungsional, lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai serangkaian proses dan interaksi yang terjadi antara individu maupun kelompok. Proses-proses ini memiliki fungsi esensial, yakni memelihara dan menjaga keberlangsungan hubungan tersebut, serta mempertahankan pola-pola interaksi yang telah terbentuk, demi memenuhi kepentingan yang relevan bagi seluruh elemen dalam sistem sosial tersebut. Dengan kata lain, teori ini menganalisis bagaimana setiap bagian masyarakat bekerja bersama untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keseluruhan sistem.¹⁷

Melalui perspektif fungsionalisme struktural, perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung dapat dipahami sebagai bagian dari upaya struktur sosial-politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam hal aspirasi politik maupun nilai keagamaan. Partai Keadilan Sejahtera berfungsi menjaga stabilitas, menciptakan integrasi sosial, dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat pada tahun 1999-2020.

Dalam menganalisis Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung tahun 1999-2020 dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori ini menekankan bahwa setiap institusi dalam masyarakat, termasuk partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera, memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Secara struktural, Partai Keadilan Sejahtera beroperasi di

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pt Grapindo Persada, 1982), hal 171.

dalam sistem politik lokal yang terdiri dari berbagai unsur: masyarakat terpilih, lembaga pemerintahan daerah, serta nilai-nilai sosial, dan budaya setempat. Oleh karena itu, setiap kegiatan Partai Keadilan Sejahtera baik kaderisasi, program kerja, maupun keterlibatannya dalam pemilu dan pilkada dapat dipahami sebagian dari upaya menjalankan fungsinya dalam sistem sosial politik masyarakat Kabupaten Bandung.

Penerapan teori fungsionalisme struktural pada penulisan ini untuk memahami dinamika perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Di Kabupaten Bandung seperti menjalani fungsi partai politik, menjaga integrasi, serta menjaga ideologinya selama periode 1999-2020.

Selain memakai teori, penelitian ini juga memakai metode pendekatan ilmu politik. Metode ini menurut Gabriel A. Almond memandang partai politik sebagai bagian dari sistem politik yang memiliki fungsi tertentu, seperti rekrutmen, pembuatan kebijakan, dan sosialisasi politik.

Pada periode 1999-2004 pada tahap awal ini sistem kaderisasi dan program kerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan bahwa partai sedang membentuk fondasi fungsionalisnya sebagai penyerap aspirasi politik berbasis nilai agama. Hasil Pemilu 1999 mengindikasikan penerimaan awal masyarakat terhadap peran struktural yang coba dimainkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Periode 2004-2009, fungsi integratif Partai Keadilan Sejahtera semakin terlihat dari partisipasinya dalam Pilpres dan berbagai Pilkada. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memainkan perannya yang lebih aktif dalam sistem politik lokal.

Periode 2009-2014, dalam periode ini fungsi partai sebagai penghubung antara masyarakat dan negara semakin kuat. Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada dan Pilpres menunjukkan bahwa partai ini telah menjadi bagian penting dari struktur demokrasi lokal.

Periode 2014-2020, pada periode ini Partai Keadilan Sejahtera mengalami transformasi simbolik ini bisa diartikan sebagai bentuk adaptasi struktural terhadap perubahan kebutuhan dan ekspektasi

masyarakat. Disini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mempertahankan fungsinya sebagai partai yang berideologi sambil menyesuaikan diri dalam struktur politik yang lebih kompetitif.

Dibagian akhir Kontribusi sosial terhadap masyarakat Kabupaten Bandung mencerminkan fungsi asli dari keberadaan partai dalam masyarakat yakni menjaga keterikatan sosial, memberi ruang partisipasi, dan menciptakan stabilitas melalui pelayanan sosial.

Melalui fungsionalisme struktural, perkembangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Bandung dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sistem sosial yang lebih luas. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sekedar menjadi institusi elektoral, melainkan juga agen yang menjalankan fungsi sosial, ideologis, dan politis dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas struktur masyarakat lokal.

4) Historiografi

Historiografi adalah tahap final dalam metode penelitian sejarah, dilakukan setelah proses heuristik, kritik, dan interpretasi selesai. Pada tahap ini, penulis melakukan penulisan sebuah bahan penelitian yang dihasilkan dan dituangkan dalam bentuk tulisan.

Pada tahap historiografi, saya menuangkan penafsiran saya terhadap sumber-sumber yang ditemukan, berlandaskan fakta-fakta sebenarnya, menjadi sebuah karya tulis. Pembahasan selanjutnya akan berfokus pada Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020.

BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini, penulis membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Bab ini memberikan ikhtisar penelitian sebagai landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II, dalam bab ini akan membahas mengenai Profil Partai Keadilan Sejahtera, yang meliputi sejarah Partai Keadilan Sejahtera, sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung, dan Visi Misi

Partai Keadilan Sejahtera.

BAB III, pada bab ini penulis akan membahas mengenai tentang Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung tahun 1999-2020, yang meliputi periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019, serta Kontribusi Partai Keadilan Sejahtera kepada masyarakat Kab Bandung.

BAB IV, bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian mengenai Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung Tahun 1999-2020, bab ini juga mencakup saran yang akan ditulis oleh penulis terhadap apa yang diteliti.

